



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2017-2022

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengukuran terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur maka perlu adanya indikator kinerja utama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3), *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007* tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004* tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 - 3. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005* tentang *Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Nomor 4585;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

7. Pengukuran Kinerja Utama adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standard, rencana atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
8. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh *Instansi Pemerintah* dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh *Instansi Pemerintah* atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh *Instansi Pemerintah* untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya berupa personil Sumber Daya Manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan melakukan evaluasi serta mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. tercapainya keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU digunakan untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;

- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati bewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan pemerintah di bidang Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Januari 2018
BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 Januari 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2018-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULA INDIKATOR)		
1	2	3	4	5	6	7		
Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur								
1	1	1	Meningkatnya kemandirian orang muda	Jumlah Wirausahawan yang baru	Koperasi	Dinas Koperasi, UKM	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah wirausahawan yang baru
		2	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Laporan pelaksanaan kegiatan	Persentase tingkat pengangguran terbuka
	2	1	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial antar pemuda	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah konflik sosial antar pemuda
		2	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah PAUD}} \times 100\%$	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia SD}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SD}} \times 100\%$	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SMP}} \times 100\%$	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah Siswa PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah PAUD}} \times 100\%$	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah LSiswa SD}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SD}} \times 100\%$	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SMP}} \times 100\%$	
			Angka Melek Huruf	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang melek huruf}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten}} \times 100\%$	

1	2	3	4	5	6	7	
		Angka Buta Huruf	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang buta huruf}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten}} \times 100\%$	
		Angka melanjutkan pendidikan ke SD	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa baru SD/ sederajat}}{\text{Jumlah lulusan SD/ sederajat tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	
		Angka melanjutkan pendidikan ke SMP	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa baru SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah lulusan SMP/ sederajat tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	
		Angka melanjutkan pendidikan ke SMA	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa baru SMA/ sederajat}}{\text{Jumlah lulusan SMA/ sederajat tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Sisiwa tingkat tertinggi jenjang SD/MI pd thn sebelumnya}} \times 100\%$	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah Sisiwa tingkat tertinggi jenjang SD/MI pd thn sebelumnya}} \times 100\%$	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	Jumlah guru yang berijazah S1	
		Persentasi Sarana Prasarana Pendidikan SD (Kondisi Baik)	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD dengan kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD}} \times 100\%$	
		Persentasi Sarana Prasarana Pendidikan SMP (Kondisi Baik)	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Data base kependidikan	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP dengan kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP}} \times 100\%$	
	3	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data base Kesehatan	Usia harapan penduduk Flores Timur
		Angka Kematian Bayi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah bayi yang lahir meninggal}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100\%$	
		Angka Kematian Ibu	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu melahirkan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100\%$	
		Angka Gizi Buruk	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan}}{\text{Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan}} \times 100\%$	
		Cakupan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data base Kesehatan		
		Cakupan Pelayanan Usia Produktif	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Base Kesehatan		
		Cakupan Penanganan kasus Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penanganan penderita penyakit menular}}{\text{Total jumlah penderita penyakit menular}} \times 100\%$	
		Cakupan Penanganan kasus Penyakit Tidak Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penanganan penderita penyakit tidak menular}}{\text{Total jumlah penderita penyakit menular}} \times 100\%$	

1			2	3	4	5	6	7
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan}}{\text{Penduduk sasaran ibu bersalin}} \times 100\%$
				Penemuan penderita baru TB BTA +	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TB BTA+ yang ditemukan}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TB BTA +}} \times 100\%$
				Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penanganan penderita penyakit DBD}}{\text{Jumlah penemuan kasus DBD}} \times 100\%$
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Base Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$
				Cakupan peserta KB aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah pesrta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
				Cakupan Pelayanan KB keluarga miskin	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	
	4	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	Sosial	Dinas Sosial	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$
	5	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		Partisipasi Perempuan pada jabatan publik	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan pada jabatan publik}}{\text{Jumlah pekerja pada jabatan publik}} \times 100\%$
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$
				Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	
Misi 2 Selamatkan Infrastruktur Flores Timur								
2	1	1	Meningkatkan Kinerja Transportasi	Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah prasarana transportasi dalam kondisi baik}}{\text{Total jumlah prasarana}} \times 100\%$
				Persentase angkutan umum laik jalan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum laik jalan}}{\text{Total jumlah angkutan}} \times 100\%$
				Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan pelaksanaan kegiatan	

1	2	3	4	5	6	7	
		Rasio ijin trayek	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan pelaksanaan kegiatan		
	2	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi social budaya	Rasio jaringan irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah panjang jaringan irigasi
		Akses air minum aman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan kegiatan		
		Persentase daerah mata air yang dikonservasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan kegiatan		
2	1	Mengurangi resiko akibat bencana alam	Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan kegiatan	Panjang talud pengendalian banjir dan pengamanan pantai
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan kegiatan	
		Persentase rehabilitasi lahan kritis	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan kegiatan		
3	1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman	Persentase rumah tidak layak huni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang tidak layak huni}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
		Persentase backlog	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Laporan pelaksanaan kegiatan		
		Akses limbah domestic sanitasi layak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Laporan pelaksanaan kegiatan		
		Akses air minum aman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	
		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan kegiatan		
		Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang drainase}} \times 100\%$	
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Total jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh perkotaan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh perkotaan}}{\text{Luas kawasan perkotaan}} \times 100\%$	
4	1	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Jumlah dokumen perencanaan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan	

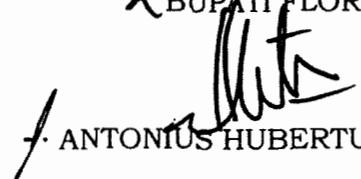
1			2	3	4	5	6	7
				Cakupan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan kegiatan	
				Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Luas kawasan RTH di wilayah perkotaan}}{\text{Luas kawasan perkotaan}} \times 100\%$
Misi 3 Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur								
3	1	1	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Persentase petani yang ditingkatkan kesejahteraannya	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	
				Produksi pertanian (jumlah dalam ton)	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian (ton)}}{\text{Luas area pertanian}} \times 100\%$
				Tanaman pangan Padi	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi padi
				Tanaman pangan Jagung	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi jagung
				Tanaman pangan Kedelai	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi kedelai
				Tanaman pangan Sorgum	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi sorgum
				Tanaman Hortikultura	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi hortikultura
				Tanaman Perkebunan Jambu Mete	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi jambu mete
				Tanaman Perkebunan Kelapa	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi kelapa
				Tanaman Perkebunan Kakao	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi kakao
				Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan}}{\text{Luas lahan pertanian}} \times 100\%$
				Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura}}{\text{Luas lahan pertanian}} \times 100\%$
				Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan}}{\text{Luas lahan pertanian}} \times 100\%$
				Ketersediaan pangan Energi (kkal/kap/hr)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan pangan Energi (kkal/kap/hr)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
				Ketersediaan pangan Protein (gr/kap/hr)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan pangan Protein (gr/kap/hr)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
				Ketersediaan pangan Lemak (gr/kap/hr)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan pangan lemak (gr/kap/hr)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
				Persentase Konsumsi pangan (PPH)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Laporan pelaksanaan kegiatan	

1		2		3		4		5		6		7	
	2	1	Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah	Persentase penguatan sistem pemasaran	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Laporan pelaksanaan kegiatan						
Misi 4 Selamatkan Laut Rakyat Flores Timur													
4	1	1	Meningkatnya kelestarian sumber daya hayati laut	Persentase penangan illegal fishing	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah penanganan illegal fishing x 100%				Jumlah illegal fishing yang terjadi	
				Persentase penanganan destruckive fishing	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah penanganan destruckive fishing x 100%				Jumlah destruckive fishing yang terjadi	
				Persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Luas kawasan konservasi laut dalam keadaan baik x100%				Luas kawasan konservasi	
	2	1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi perikanan tangkap					
				Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi perikanan budidaya					
				Luas Area Garam (Ha)	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Luas area garam x 100%				Jumlah produksi garam	
				Jumlah Produksi Garam (ton/tahun)	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi garam x 100%				Luas area garam	
				Jumlah kawasan ekonomi khusus kelautan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan						
				Jumlah kawasan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Laporan pelaksanaan kegiatan						
Misi 5 Reformasi Birokrasi													
5	1	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	Administrasi Pemerintahan	Bagian Organisasi, semua OPD	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan x 100%				Jumlah total OPD	
				Jumlah OPD yang memiliki SOP	Administrasi Pemerintahan	Bagian Organisasi, semua OPD	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah OPD yang memiliki SOP x 100%				Jumlah total OPD	
				Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Administarsi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah penduduk yang memiliki KTP				Total jumlah penduduk	
				Rasio pasangan ber Akte nikah	Administarsi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pasangan suami isteri yang berakte nikah				Total jumlah pasangan suami isteri	
				Rasio penduduk ber Akte kelahiran	Administarsi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran				Total jumlah penduduk	
				Jumlah ijin yang dilayani tiap tahun	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah Perizinan yang dilayani tiap tahun					
				Pola pengembangan karier ASN daerah	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Laporan pelaksanaan kegiatan						

1	2	3	4	5	6	7
		Ketersediaan dokumen perencanaan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan	Dokumen perencanaan
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan	Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan	Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda
		Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Pengawasan	Inspektorat Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan	
		OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	Keuangan	Badan Keuangan Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah OPD yang menerapkan <u>sistem informasi keuangan daerah</u> x 100% Jumlah OPD yang ada
		Desa sadar hukum dan komunitas	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan pelaksanaan kegiatan	
		Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat
		Jumlah kasus kriminal di masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah kasus Kriminal di masyarakat
		Cakupan pelayanan korban bencana	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan	
		Jumlah konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan pelaksanaan kegiatan	
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan pelaksanaan kegiatan	<u>Jumlah penduduk yang terlibat dalam proses pemilu</u> x 100% Jumlah penduduk yang berstatus pemilih
		Prosentase pemberdayaan forum kemitraan pemerintah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan pelaksanaan kegiatan	
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan pelaksanaan kegiatan	

1	2	3	4	5	6	7	
	2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	Desa Sangat Tertinggal	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah desa sangat tertinggal}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100\%$
			Desa Tertinggal	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100\%$
			Desa Berkembang	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100\%$
			Desa Maju	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100\%$
			Desa Mandiri	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100\%$

BUPATI FLORES TIMUR, 

 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON